

REVOLUSI MENTAL DALAM PERSPEKTIF BUDAYA JAWA: ANALISIS MELALUI PEMIKIRAN PIERRE BOURDIEU

*Mental Revolution in Javanese Cultural Perspective:
The Pierre Bourdieu's Thinking Analysis*

Ujianto Singgih Prayitno

*Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta*

Naskah diterima: 17 September 2017
Naskah dikoreksi: 19 November 2017
Naskah diterbitkan: Desember 2017

Abstract: *The socio-cultural conditions of today's society are increasingly worrisome, whether viewed from the relationships between individuals or groups that are not harmonious, also the tendency of people who use violence as a mechanism to solve the problems they faced. Such concerns need to be resolved immediately, and the Mental Revolution as an idea gains its momentum. The approach developed in this analysis is the concepts of practice and action implementation, by examining the role of Javanese culture. The selection of Javanese Culture as the basis for the development of Mental Revolution value is inseparable from the culture or ethnic Javanese as the largest ethnic group in Indonesia which reaches 40 percent of the population. Dominant culture is a substantive model that reflects the fact that there is a rule of action in social life that is mutually agreed upon in emerging social interactions. Most Javanese everywhere, tend to maintain their Javanese ethnicity in their daily lives.*

Keywords: *structural, habitus, Javanese culture, Mental Revolution.*

Abstrak: Kondisi sosial budaya masyarakat dewasa ini makin mengkhawatirkan, baik dilihat dari relasi antar individu ataupun kelompok yang tidak harmonis, juga kecenderungan masyarakat yang menggunakan kekerasan sebagai mekanisme penyelesaian masalah yang dihadapinya. Kekhawatiran tersebut perlu segera diselesaikan, dan revolusi mental sebagai sebuah gagasan mendapatkan momentumnya. Pendekatan yang dibangun dalam analisis ini adalah konsep-konsep praktik dan pelaksanaan tindakan, dengan mengkaji peran kebudayaan Jawa. Pemilihan Budaya Jawa sebagai dasar bagi pengembangan nilai Revolusi Mental, tidak terlepas dari budaya atau etnik Jawa merupakan etnik terbesar di Indonesia yang mencapai 40 persen dari populasi. Kebudayaan dominan adalah sebuah model substantif yang merefleksikan kenyataan yang memperlihatkan adanya aturan main dalam kehidupan sosial yang disetujui bersama dalam interaksi sosial yang muncul. Kebanyakan orang Jawa dimanapun berada, cenderung untuk mempertahankan kesukubangsaan mereka yang Jawa dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Kata kunci: struktural, habitus, budaya Jawa, Revolusi Mental.

Pendahuluan

Reformasi telah berjalan 19 (sembilan belas) tahun, namun situasi negara dan bangsa masih belum memperlihatkan tanda akan keluar dari krisis kelangsungan hidup, sementara bangsa lain di sekitar kita telah bergumul dengan masalah-masalah lain yang lebih maju. Reformasi telah mengubah kondisi sosial budaya sedemikian rupa dari bangsa yang dikenal sabar, ramah, penuh sopan santun dan pandai berbasa basi, menjadi pemaarah, suka mencaci, membakar manusia hidup-hidup, perang antar kampung dan suku, bahkan yang lebih tragis, anak-anak yang masih di bangku sekolah pun sudah melakukan tindakan di luar nalar, seperti tawuran dengan nafsu untuk saling bunuh di jalanan.

Krisis kelangsungan hidup ini bersumber pada kebencian yang muncul tidak hanya dari perbedaan kelas sosial, tetapi juga oleh perbedaan nasib yang diberikan oleh sejarah masa lalu, yang memunculkan keinginan untuk balas dendam yang berlangsung di hampir seluruh pranata sosial. Kondisi ini berjalan sesuai dengan sejarah panjang pembangunan masyarakat yang sering dipersepsi tidak adil, menyangkut kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Braudel (1969), menyatakan bahwa rentang panjang sejarah masyarakat berperan dalam membentuk karakter manusia dan secara mendasar akan memperlihatkan sifat-sifat dasar dan kecenderungan ideologis dan politis dalam merespons kondisi alam dan sosial budaya sekelilingnya.

Menyadari kondisi sosial yang tak kunjung pulih, muncul wacana revolusi mental yang kemudian menjadi salah satu program unggulan Presiden Joko Widodo. Namun demikian, efektifitas program ini masih belum dirasakan hasilnya, karena belum dilakukan sosialisasi secara masif. Diperlukan strategi budaya yang tepat, mengingat revolusi mental menyangkut tata nilai yang inheren berada dalam diri manusia. Tulisan ini tidak bermaksud untuk menjelaskan revolusi mental yang terjadi dalam setiap budaya yang ada di Indonesia yang memiliki tingkat diferensiasi yang tinggi keberagamannya. Budaya Jawa dipilih dalam analisis ini mengingat budaya atau etnik Jawa merupakan etnik terbesar di Indonesia yang tersebar di hampir seluruh pelosok Indonesia.¹

Tesis budaya dominan ini disampaikan oleh Parsudi Suparlan (2006) yang mengutip pandangan Bruner tentang hipotesis budaya dominan, yaitu bahwa hipotesis kebudayaan dominan adalah sebuah model substantif yang merefleksikan kenyataan hubungan antarsuku bangsa dalam sebuah konteks struktur kekuatan setempat. Lebih lanjut Suparlan menjelaskan bahwa produk dari hubungan antarsuku bangsa tersebut ditentukan oleh corak hubungan di antara suku-suku bangsa setempat yang ada, dan oleh corak hubungan antara masing-masing suku bangsa tersebut dengan struktur kekuatan setempat yang ada. Dalam hipotesis kebudayaan dominan tercakup tiga unsur yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi satu sama lainnya saling berhubungan, dan menentukan corak kesukubangsaan atau produk dari hubungan antarsuku bangsa yang terjadi. Unsur-unsur tersebut adalah (Suparlan, 2006):

- a. demografi sosial yang mencakup rasio populasi dan corak heterogenitas serta tingkat percampuran hubungan di antara suku-suku bangsa yang ada dalam sebuah konteks latar tertentu;
- b. kemantapan atau dominasi kebudayaan suku bangsa setempat, bila ada, dan cara-cara yang biasanya dilakukan oleh anggota-anggota kelompok-kelompok suku bangsa pendatang dalam berhubungan dengan suku-suku bangsa setempat dan penggunaan kebudayaan masing-masing serta pengartikulasiannya;

¹ Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia atau tepatnya 1.340 suku bangsa menurut sensus BPS tahun 2010. Suku Jawa adalah kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Orang Jawa kebanyakan berkumpul di pulau Jawa, akan tetapi jutaan jiwa telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara, bahkan bermigrasi ke luar negeri seperti ke Malaysia dan Suriname. Suku Sunda, Suku Batak, dan Suku Madura adalah kelompok terbesar berikutnya.

- c. keberadaan dari kekuatan sosial dan pendistribusiannya di antara berbagai kelompok suku bangsa yang hidup dalam konteks latar tersebut.

Atas dasar hipotesis budaya dominan ini, setidaknya memperlihatkan adanya aturan main dalam kehidupan sosial yang disetujui bersama dalam interaksi sosial yang muncul. Kebanyakan orang Jawa dimanapun berada, cenderung untuk mempertahankan kesukubangsaan mereka yang Jawa dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Di samping itu secara internal, kebudayaan Jawa juga memperlihatkan kekuatan nilai-nilai budaya Jawa dalam membangun kebersamaan masyarakat dalam menghadapi musibah, yaitu bencana gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 yang menyebabkan lebih dari 6.200 jiwa meninggal dunia.² Pada saat itu, masyarakat Yogyakarta tidak menunggu terlalu lama untuk bangkit dari dampak bencana alam. Jong (1976) dalam Endraswara (2006: 43) mengemukakan bahwa unsur sentral kebudayaan Jawa adalah sikap *rila*, *nrima*, dan *sabar*.³ Hal ini akan mendasari segala gerak dan langkah orang Jawa dalam segala hal. Di samping itu, orang Jawa juga memiliki etos kerja yang kuat dan disiplin tinggi.⁴ Hal ini menunjukkan, bahwa di dalam kehidupan masyarakat Indonesia terdapat nilai-nilai sosial yang membentuk sistem budaya dan telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-

² Gempa bumi Yogyakarta Mei 2006 adalah peristiwa gempa bumi tektonik kuat yang mengguncang Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada 27 Mei 2006 kurang lebih pukul 05.55 WIB selama 57 detik. Gempa bumi tersebut berkekuatan 5,9 pada skala Richter. *United States Geological Survey* melaporkan bahwa gempa terjadi sebesar 6,2 pada skala Richter.

³ *Rila* disebut juga *eklas*, yaitu kesediaan menyerahkan segala milik, kemampuan dan hasil karya kepada Tuhan. *Nrima* berarti merasa puas dengan nasib dan kewajiban yang telah ada, tidak memberontak, tapi mengucapkan *matur nuwun* (terima kasih). *Sabar*, menunjukkan ketiadaan hasrat, ketiadaan nafsu yang bergolak.

⁴ Nilai-nilai yang ditanamkan orang tua kepada anaknya umumnya terkait dengan kewajiban dalam mencari penghidupan (pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari). Mereka akan terus mendorong anaknya dengan memberikan nilai-nilai yang arif dan memberikan sebuah perumpamaan-perumpamaan sebagai *tuladha* (contoh). Kata-kata arif yang sering diucapkan oleh orang tua kepada anaknya agar mau bekerja, misalnya *ana dina ana upa*, artinya ada hari pasti ada rizqi; *aja sangga uang* "jangan berpangku tangan"; *obah-mamah*, lebih lengkapnya dalam sebuah nasehat *sing sopo gelem obah bakal mamah*, artinya siapa yang mau berusaha (bekerja) pasti akan makan (Prabowo, 2003:23). Nasehat tersebut memiliki arti yang sangat dalam. *Obah* yang berarti bergerak, menunjukkan bahwa kita harus bekerja untuk mendapatkan *mamah* (makan) yang berarti rizki.

hari, yang mendorong manusia berkelompok dan membentuk entitas. Oleh karena itu dapat dipahami jika kebangkitan masyarakat Yogya dari bencana, antara lain dipengaruhi oleh sikap mental orang-orang Jawa yang memiliki pandangan hidup yang khas, yang menjadi acuan dalam bertindak dalam kehidupan.

Permasalahan yang dapat diajukan, adalah apakah budaya Jawa dapat berperan dalam mengonstruksi revolusi mental dewasa ini dalam perspektif Piere Bourdieu? Budaya Jawa berkaitan dengan relasi, yaitu interaksi orang Jawa dalam masyarakat berkaitan dengan perkembangan sosial dan budaya. Pendekatan yang dibangun dalam analisis ini adalah studi mengenai kegiatan manusia sehari-hari khususnya terkait dengan aspek-aspek interaksi sosial yang diambil begitu saja (*taken for granted*) (Poloma 1994:284), Disamping itu, pendekatan ini menekankan pada konsep-konsep praktik dan pelaksanaan tindakan yang tidak terlalu memandang hal-hal yang berhubungan dengan sejarah kebudayaan suatu kelompok masyarakat (Spradley, 1997), melainkan pilihan yang digunakan dalam mengkaji peran kebudayaan Jawa.

Dalam perspektif sosiologi, revolusi mental hanya mungkin dilakukan dalam proses penanaman nilai-nilai yang dalam perpektif Bourdieu disebut dengan habitus. Habitus dapat dirumuskan sebagai sebuah sistem disposisi-disposisi, sebagai skema-skema persepsi, pikiran, dan tindakan yang diperoleh dan bertahan lama.⁵ Dalam kaitan ini Budaya Jawa dikembangkan oleh agen-agen individual melalui disposisi-disposisi sebagai tanggapan terhadap kondisi-kondisi objektif revolusi mental, dan dalam proses inilah penanaman struktur sosial objektif ke dalam pengalaman mental dan subjektif dari si agen dilakukan.

⁵ Konsep habitus telah digunakan sejak Aristoteles namun dalam penggunaan kontemporer diperkenalkan oleh Marcel Mauss dan kemudian Maurice Merleau-Ponty. Namun, Pierre Bourdieu lah yang mengubahnya menjadi landasan sosiologi, dan menggunakannya untuk mengatasi masalah sosiologis agensi dan struktur: habitus dibentuk oleh posisi struktural dan menghasilkan tindakan, sehingga ketika orang bertindak dan menunjukkan agensi yang mereka simak secara simultan dan mereproduksi struktur sosial. Bourdieu menguraikan teorinya tentang habitus sambil meminjam gagasan tentang skema kognitif dan generatif dari ketergantungan Noam Chomsky dan Jean Piaget pada sejarah dan ingatan manusia. Misalnya, perilaku atau kepercayaan tertentu menjadi bagian dari struktur masyarakat ketika tujuan awal dari perilaku atau kepercayaan tersebut tidak dapat diingat lagi dan disosialisasikan ke individu dari budaya itu.

Budaya dan Etika Jawa

Pilihan Budaya Jawa sebagai dasar bagi konstruksi Revolusi Mental ini juga mengikuti pemikiran politik Yahya Muhaimin yang menyatakan bahwa pemikiran dan tingkah laku politik masyarakat Indonesia yang multietnis, sebenarnya bukan dipengaruhi oleh campuran nilai budaya berbagai suku bangsa yang banyak itu, tetapi hanya nilai beberapa suku bangsa tertentu. Diantara beberapa suku bangsa yang sangat berpengaruh itu, Jawa dengan cara berpikir dan pola hidupnya adalah yang paling dominan. Dominasi ini disebabkan oleh jumlah orang Jawa yang cenderung mendominasi kehidupan politik, dan keberadaan pusat pemerintahan yang kebetulan berada di Jawa. Oleh karena itu, selalu terdapat kecenderungan pada suku-suku Non Jawa untuk selalu mengadaptasi diri dengan nilai-nilai kejawaan atau menjadikan nilai Jawa sebagai basis persepsi politik mereka (Yahya Muhaimin, dalam Gunawan, 2007).

Pandangan tersebut sejalan dengan Aristides Katoppo, bahwa Budaya politik nasional, termasuk budaya berdemokrasi dan khususnya berkaitan dengan bangunan sistem kekuasaan, merupakan hasil akumulasi, agregasi dari budaya, dan sistem kekuasaan dari daerah-daerah (budaya lokal). Namun, suatu hal yang tidak dapat dipungkiri adalah, bahwa dominasi budaya Jawa terhadap pembentukan budaya politik nasional merupakan suatu keniscayaan. Hal tersebut karena bukan saja kekuasaan negeri ini dikendalikan dari Jawa, tapi struktur kekuasaan yang ada pun didominasi oleh orang Jawa, sebagai akibat dari dominannya etnis Jawa secara kuantitatif. (Katoppo, 1979).⁶

Anderson (1965) menyatakan bahwa Budaya Jawa telah membuktikan terjadinya interaksi tersebut selama ribuan tahun, yang kemudian membentuk pola tersendiri yang disesuaikan dengan daya pikir Jawa, dan ini adalah kemampuan unik dari Jawa dalam mentolerir segala bentuk pengaruh asing yang masuk untuk dijadikan bagian dari Jawa. (Anderson, 1965). Hofstede (1982) menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi budaya, yaitu jarak kekuasaan, penghindaran konflik, individualisme/kolektivisme dan maskulinitas/femininitas pada masyarakat Indonesia yang berhubungan erat dengan karakteristik budaya Jawa.

Sejalan dengan hipotesis budaya dominan, dominasi budaya dalam sebuah masyarakat akan melahirkan pengaruh yang nyata terhadap perilaku

⁶ Kondisi ini membuat kecenderungan etnis lain mengakomodir/menyesuaikan dengan budaya Jawa, termasuk dalam mengelola kekuasaan. Akibat lanjutannya konsep demokrasi dan konsep kekuasaan nasional, sangat dipengaruhi oleh konsep kekuasaan Jawa.

individu dan masyarakat (Kanungo dan Mendonca 1996), bahwa budaya Jawa menjadi budaya dominan yang mempengaruhi perilaku manusia Indonesia (Magnis-Suseno 1997; Mann 1996; Yudianti dan Goodfellow 1997). Perilaku ini termuat dalam atau diarahkan oleh aspek kultural dan norma sosial (Chariri, 2006)

Etika merupakan salah satu manifestasi dari norma sosial, yang dalam konteks etika Jawa bertujuan untuk menjaga harmoni sosial. Harmoni sosial ini membentuk hubungan sosial dalam masyarakat Jawa berdasarkan dua prinsip yang menjelaskan ide-ide orang Jawa tentang kehidupan yang baik, yaitu penghindaran konflik dan rasa menghargai (hormat). Prinsip penghindaran konflik dan prinsip rasa menghargai ini dimanifestasikan di dalam kehidupan sosial Jawa melalui kedudukan hirarkis dan kolektivisme/kebersamaan (Magnis Suseno, 1997).

Sumber Budaya Jawa

Meski orang Jawa tersebar di seluruh pelosok Tanah Air, namun mereka tetap dapat diidentifikasi sebagai orang yang memiliki sistem budaya tertentu, yaitu Budaya Jawa. Mengadopsi pandangan Fukuyama, (2000:327), bahwa orang Jawa berinteraksi melalui hubungan moral kepercayaan, yang saling berbagi norma atau nilai informal melampaui nilai-nilai atau norma-norma yang penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu, memberikan pengakuan kepada kelompok-kelompok etnik dan budaya agar dapat memposisikan dirinya ke dalam sebuah kehidupan bersama yang memiliki kesanggupan untuk memelihara identitas kelompoknya. Orang Jawa ini, dimanapun mereka berada akan mampu berinteraksi dalam ruang bersama yang ditandai oleh kesediaan untuk menerima kelompok-kelompok lain yang berbeda basis identitasnya untuk menemukan kebutuhan bersama bagi sebuah integrasi.

Sistem budaya Jawa meyakini bahwa peran keraton dalam ranah sosial dan budaya adalah sentral, karena keraton adalah salah satu lokus pendidikan budaya dimana nilai dan budaya mengalir ke bawah paling deras (Kuntowijoyo, 2006). Selain itu, peran keraton dalam pelaksanaan adat dan tradisi sangat penting karena pelaksanaan adat dan tradisi termasuk dalam pemeliharaan kekuasaan keraton itu sendiri. Pada tahun 1996, Sri Sultan Hemengkubuwono X dengan jelas mengatakan bahwa dirinya dan Keraton Yogyakarta adalah simbol dan penjaga budaya Jawa, tugas dari Keraton harus dibatasi kepada kegiatan budaya dan pelaksanaan ritual (Woodward, 2010).

Diakui atau tidak, keraton memiliki otoritas politik terutama dalam pengaturan masyarakat yaitu kemampuan untuk membuat perintah agar masyarakat berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Otoritas politik merupakan sebuah otoritas yang memberikan alasan untuk tindakan, bukan alasan untuk berpikir, sehingga otoritas politik disebut otoritas praktis (Cristiano, 2004). Otoritas dalam kebudayaan Jawa berbeda dengan otoritas dalam budaya Barat, yaitu pada sifat dasar otoritas, sumber otoritas, sifat otoritas, dan legitimasi dari otoritas (Anderson, 2006). Otoritas dalam kebudayaan Jawa bersumber dari wahyu Ilahi yang diberikan kepada orang-orang terpilih sehingga legitimasi dari otoritas tidak berasal dari rakyat yang dipimpin tetapi dari ranah supernatural. Dengan konsep otoritas seperti ini, otoritas seorang raja berakhir ketika wahyu Ilahi tersebut berpindah ke orang lain. Perpindahan wahyu ini bisa dilihat oleh rakyat jelata dari penurunan kepemimpinan atau kekalahan raja dalam peperangan.

Kekuasaan raja adalah kekuasaan absolut karena kekuasaan raja adalah tanggung jawab yang diberikan langsung oleh Tuhan melalui pemberian wahyu. Otoritas politik keraton dalam masyarakat Jawa tradisional meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat karena keraton adalah pusat dari kehidupan. Keraton adalah asal dari kehidupan itu sendiri sehingga pengaturan kehidupan diberikan seluruhnya kepada keraton.⁷ Otoritas Sultan dalam masyarakat tradisional Yogyakarta terlegitimasi oleh budaya dan kultur masyarakat. Bagi masyarakat tradisional Yogyakarta, tiap kata yang diucapkan Sultan adalah hukum, karena Sultan bukan sekedar seseorang yang kebetulan memegang kekuasaan tetapi seseorang yang didukung oleh segenap kekuatan magis pusaka-pusaka kerajaan.

Dalam kaitan ini, keraton tampil sebagai sumber tata nilai yang berkembang di masyarakat Jawa. Di dalam kehidupan masyarakat Jawa terdapat nilai-nilai sosial yang membentuk mental orang Jawa yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mentalitas orang Jawa tak bisa dilepaskan dari nilai-nilai religi yang dianut masyarakat Jawa,

⁷ Aspek ini terlihat dari gelar penuh Sri Sultan Hamengkubuwono X yaitu *Sampeyan dalem Inggang Simuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono, Senopati Ing Ngalogo, Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo, Kalifatullah Inggang Kaping X*. Arti gelar yang panjang ini adalah dia adalah penguasa yang sah di dunia ini; dia juga *Senopati Ing Ngalogo*, yang berarti bahwa dia adalah panglima tertinggi, penentu perdamaian dan peperangan. Sultan juga disebut *Abdurrahman Sayidin Panoto Gomo* yang berarti penata agama yang pemurah, sebab dia diakui sebagai *Kalifatullah*, pengganti Muhammad SAW (Soemardjan, 1962).

sehingga nilai-nilai ini semakin melekat pada diri mereka. Tidak mengherankan, jika nilai-nilai sosial ini dijalankan tidak semata-mata untuk menjaga keharmonisan hubungan antarmanusia, tetapi juga menjadi bentuk pengabdian manusia kepada Sang Pencipta.

Modal Budaya dan Habitus

Pierre Bourdieu adalah sosiolog Prancis yang mengemukakan gagasan tentang 'teori masyarakat' yang komprehensif melalui metode terapan yang menganalisis kekuatan dalam proses perubahan sosial (Harris et al, 2006). Teori Bourdieu berpengaruh secara luas dalam banyak penelitian sosiologis dan di berbagai isu sosial, yang dinilai sangat produktif. Minat peneliti terhadap teori Bourdieu disebabkan teori Bourdieu melihat metode sosiologis sebagai bagian dari proses perubahan. Metode dan terminologi yang digunakan oleh Bourdieu berbeda dari yang digunakan oleh banyak sosiolog lainnya, dengan menawarkan analisis sosiologis yang jauh lebih rinci tentang hubungan kekuasaan yang komprehensif.

Menurut Reed-Danahay, Pierre Bourdieu (1930-2002) tercatat sebagai sosiolog yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Istilah-istilah kuncinya adalah habitus, ranah (*field*), dan kekerasan simbolik. Ia meluaskan gagasan modal (*capital*) ke kategori-kategori seperti modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Bagi Bourdieu, setiap individu menempati suatu posisi dalam ruang sosial multidimensional. Ruang itu tidak didefinisikan oleh keanggotaan kelas sosial, namun melalui jumlah setiap jenis modal yang ia miliki. Modal itu mencakup nilai jejaring sosial yang bisa digunakan untuk memproduksi atau mereproduksi ketidaksetaraan.

Bagi Bourdieu, habitus sangat terkait dengan struktur sosial dan penting untuk analisis sosiologis. Bourdieu mendefinisikan habitus sebagai struktur penataan, yang mengatur praktik dan persepsi praktik. (Bourdieu, P. 1984:170). Habitus adalah sistem kognitif yang tertanam dalam kesadaran kolektif individu yang merupakan representasi dalam struktur masyarakat. Habitus terdiri dari pikiran, kepercayaan, minat dan pemahaman tentang dunia di sekitar yang diciptakan melalui sosialisasi melalui keluarga, budaya dan pendidikan. Menurut Bourdieu habitus memiliki potensi untuk mempengaruhi tindakan dan untuk membangun dunia sosial. Maka Bourdieu melihat habitus sebagai kunci bagi reproduksi sosial karena bersifat sentral dalam membangkitkan dan mengatur praktik-praktik yang membentuk kehidupan sosial. Individu-individu belajar untuk mendambakan hal-

hal yang dimungkinkan bagi mereka, dan tidak mengaspresiasi hal-hal yang tidak tersedia bagi mereka.

Dunia sosial menurut Bourdieu merupakan lingkungan yang saling bergantung. Tidak ada habitus dari dua individu yang akan persis sama. Poin penting dalam teori Bourdieu adalah bahwa habitus menghambat tapi tidak menentukan pemikiran dan tindakan (Bourdieu, P. 1984:170), jika seseorang secara reflektif dan sadar terhadap habitus mereka sendiri, memiliki potensi untuk mengamati dunia sosial dengan relatif objektif. Bagi Bourdieu kemampuan untuk merenungkan kebiasaan seseorang sangat penting bagi wacana teoritis dan penelitian ilmiah, yaitu bahwa setiap hal dalam dunia sosial saling bergantung dan tidak terpisah. Habitus diciptakan melalui proses sosial, bukan individual yang mengarah ke pola yang bertahan lama dan dapat dialihkan dari satu konteks ke konteks lainnya, namun juga bergeser dalam kaitannya dengan konteks spesifik dan seiring berjalannya waktu. Habitus tidak tetap atau permanen, dan dapat diubah dalam situasi yang tidak terduga atau dalam periode sejarah yang panjang (Navarro 2006:16). Habitus bukanlah hasil kehendak bebas, atau ditentukan oleh struktur, namun diciptakan oleh interaksi antara keduanya dari waktu ke waktu, yang membentuk struktur saat ini (Bourdieu 1984:170), Dalam pengertian ini, habitus diciptakan dan direproduksi tanpa disadari.

Selain itu, konsep lain yang penting dalam gagasan Bourdieu adalah *capital* atau 'modal' yang bersifat sosial, budaya atau simbolis (Bourdieu 1986: dikutip dalam Navarro 2006:16). Bentuk-bentuk modal ini sama pentingnya, dan dapat diakumulasikan dan dipindahkan dari satu arena ke arena lainnya (Navarro 2006:17). Modal budaya memainkan peran sentral dalam hubungan kekuasaan masyarakat, sebagai sarana untuk bentuk membangun dominasi dan hierarki non-ekonomi, (Gaventa 2003:6). Modal budaya tertanam dalam pikiran orang-orang sebagai tatanan sosial seperti sistem pendidikan, bahasa, nilai, dan termasuk aktivitas kehidupan sehari-hari.

Konsep ketiga disamping kedua konsep yang telah disebutkan sebelumnya dalam teori Bourdieu adalah gagasan tentang ranah (*field*) yaitu berbagai arena sosial dan kelembagaan di mana orang mengekspresikan dan mereproduksi dan memperebutkan distribusi berbagai jenis modal (Gaventa 2003: 6). Konsep ini sebagai ganti analisis masyarakat lewat konsep kelas, dan Bourdieu menggunakan konsep ranah (*field*), yakni sebuah arena sosial yang di dalamnya orang bermanuver dan berjuang, dalam mengejar sumber daya yang

didambakan. Ranah merupakan jaringan, struktur atau kumpulan hubungan yang mungkin seperti intelektualitas, religiusitas, pendidikan, dan budaya (Navarro 2006:18), Bourdieu menggambarkan *field* atau ranah lapangan sebagai:

“a field of forces, whose necessity is imposed on agents who are engaged in it, and a field of struggles within which agents confront each other, with differentiated means and ends according to their position in the structure of the field of forces, thus contributing to conserving or transforming its structure.” (Reed-Danahay, D : 32).

Implementasi Revolusi Mental

Kajian ini memperlihatkan bahwa Revolusi Mental bersumber dari kebudayaan Jawa. Secara umum kebudayaan muncul sebagai hasil dari olah pikir manusia, karena manusia mempunyai kapasitas untuk mencerap apa yang terjadi di sekelilingnya, selanjutnya menganalisis dan menafsirkan baik sebagai hasil pengamatan maupun pengalaman. Pengetahuan merupakan keluaran dari proses pembelajaran, penjelasan berdasarkan pemikiran dan persepsi manusia. Pengetahuan dalam setiap corak kebudayaan diciptakan oleh sekelompok masyarakat dari generasi ke generasi yang hidup menyatu dan selaras dengan alam. Pengetahuan seperti ini berkembang dalam lingkup lokal, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Seperti telah disampaikan sebelumnya, Bourdieu merumuskan konsep habitus sebagai analisis sosiologis perilaku manusia. Dalam arti ini, habitus adalah nilai-nilai sosial yang dihayati oleh manusia, dan tercipta melalui proses sosialisasi nilai-nilai yang berlangsung lama, sehingga mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang menetap di dalam diri manusia. Hal inilah sesungguhnya yang dikehendaki oleh revolusi mental, yaitu dengan membuat seseorang memiliki sikap dan perilaku yang kuat, serta tertanam dan menjelma menjadi perilaku fisik. Pembiasaan ini diperoleh dari penghayatan nilai-nilai yang ada di lingkungan tempat tinggal yang kemudian mengendap menjadi cara berpikir dan pola perilaku yang dihayati sebagai anggota masyarakat. Budaya Jawa merupakan modal yang memungkinkan individu mendapatkan kesempatan-kesempatan yang terjelma di dalam modal intelektual (pendidikan), modal ekonomi (uang), dan modal budaya (latar belakang dan jaringan). Modal ini hanya mungkin diperoleh, jika orang memiliki habitus yang tepat dalam hidupnya.

Agar dapat berjalan dengan baik revolusi mental harus berlangsung dalam sebuah struktur sebagai ruang khusus yang ada di dalam masyarakat.

Meminjam konsep Bourdieu, tingkat keberhasilan revolusi mental sangat tergantung pada ketersediaan habitus dan modal yang tepat dalam masyarakat. Dengan demikian, konsep habitus, kapital, dan arena terkait amat erat, agar revolusi mental dapat berhasil dalam salah satu arena dalam kehidupan, seseorang perlu mempunyai habitus dan kapital yang tepat untuk arena itu. Jika tidak memiliki habitus dan kapital yang tepat untuk satu arena saja, maka kemungkinan besar, akan gagal dalam arena tersebut.

Dalam perspektif Bourdieu, budaya Jawa dan revolusi mental dapat menjadi sumber bagi berlangsungnya perubahan sosial, mengingat perubahan sosial dapat dilakukan, jika orang memiliki habitus, kapital, dan mampu menempatkan keduanya dalam konteks revolusi mental dan Budaya Jawa. Prinsip ini berlaku untuk semua arena, mulai dari arena pendidikan, arena budaya, dan sebagainya. Oleh karena itu, jika akan membuat perubahan sosial di dalam arena revolusi mental, perlu dipastikan habitus yang tepat sebagai seseorang yang memiliki pemahaman tentang budaya Jawa, yaitu yang mampu memperluas dan mempertahankan jaringan sosialnya sebagai orang Jawa. Habitus ini akan menghasilkan kapital budaya, kapital intelektual, kapital ekonomi yang tepat, yang akan membuat seseorang memiliki mental yang sama sekali berbeda dengan mental sebelumnya sesuai dengan nilai-nilai Jawa yang menjadi acuan untuk membuat perubahan sosial.

Manusia mempunyai kapasitas untuk mencerap apa yang terjadi di sekelilingnya, selanjutnya menganalisis dan menafsirkan baik sebagai hasil pengamatan maupun pengalaman. Sistem pengetahuan bersifat dinamis, karena terus berubah sesuai dengan waktu dan interaksi dengan lingkungan yang berkembang. Menurut Johnson (1992) dalam Sunaryo dan Joshi (2003), kebudayaan Jawa sebagai pengetahuan masyarakat lokal adalah sekumpulan pengetahuan yang diciptakan oleh sekelompok masyarakat dari generasi ke generasi yang hidup menyatu dan selaras dengan alam. Pengetahuan seperti ini berkembang dalam lingkup lokal, menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Kebudayaan Jawa merupakan konsep yang merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang hidup di wilayah Jawa terutama Yogyakarta, untuk jangka waktu yang lama. Sebagai pandangan masyarakat, Budaya Jawa tidak hanya sebatas pada apa yang dicerminkan dalam pemahaman (*insight*), persepsi dan suara hati atau perasaan (*intuition*) yang berkaitan dengan interaksi sosial. Dengan demikian Budaya

Jawa telah menyatu dengan sistem kepercayaan, norma dan budaya, dan diekspresikan di dalam tradisi dan mitos, yang dianut dalam jangka waktu cukup lama. Oleh karena itu, Budaya Jawa perlu dipahami sebagai basis sosial yang memiliki kekuatan penggerak dalam berbagai hal, termasuk alternatif solusi dalam implementasi revolusi mental. Revolusi mental merupakan bagian dari konstruksi budaya, yang mengacu pada perubahan karakter kolektif sebagai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial di antara warga masyarakat. Kohesi sosial ini menjadi faktor kunci dalam perubahan sosial, meningat setiap kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, baik dalam komunitas desa, kota, maupun kelompok kekerabatan, dan memiliki suatu corak yang khas. Kekhasan corak ini dapat disebabkan oleh adanya suatu unsur kecil yang khas dalam setiap daerah kebudayaan tersebut.

Namun demikian, masih banyak kearifan lokal yang masih dapat bertahan dan melekat di kehidupan masyarakat, seperti sistem pertanian subak di Bali, sistem pelestarian hutan oleh suku-suku pedalaman, sistem pengaturan mencari ikan di pedalaman Papua, sistem penetasan telur ayam dengan menggunakan gabah dan gerabah di Nusa Tenggara, sistem pengelolaan tanah ulayat yang berkelanjutan dan lain-lain ternyata dapat diterapkan sejalan dengan kehidupan modern. Kita seharusnya menyadari bahwa kearifan lokal itu bukanlah merupakan suatu yang ditemukan dan dikembangkan oleh para nenek moyang kita secara instan, tetapi dikembangkan dalam waktu lama dan selaras dengan pelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, untuk memahami revolusi mental yang bersumber dari kebudayaan Jawa sebagai bentuk aktivitas manusia sosiokultural memerlukan pemahaman sistem atau konfigurasi nilai-nilai yang melandasi cara berpikir, cara berekspresi, cara berperilaku, dan hasil tindakan manusia. Melalui pemahaman ini, akan ditemukan bahwa pengembangan mental dengan karakter baru pada dasarnya bukan hanya sekadar reaksi spontan atas situasi objektif yang dihadapi, melainkan jauh lebih dalam yang mencakup tata nilai tertentu yang berlaku dalam suatu kebudayaan. Suatu tata nilai budaya tertentu tidak selalu terumuskan secara eksplisit dan sistematis, namun biasanya diam-diam telah bersemayam dalam kesadaran kolektif masyarakat yang bersangkutan. Sistem nilai yang dimaksud biasanya meresap dan menggejala dalam ide-ide, gagasan-gagasan, bahkan keyakinan-keyakinan tertentu yang menjadi kerangka penuntun cara berpikir sekaligus isi pikiran, yang pada gilirannya terekspresikan dalam pola perilaku dan hasil-hasil yang kongkrit dalam kehidupan.

Nilai Sosial Ideal Budaya Jawa

Bagaimana rupa dan bentuk budaya Jawa yang ingin dikembangkan tersebut, terdapat dalam sebuah Naskah Tata Nilai Budaya Yogyakarta yang ditetapkan dalam sebuah peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tata Nilai Budaya Yogyakarta. Salah satu tujuan ditetapkannya Perda ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh masyarakat Yogyakarta, meski disadari bahwa perumusan suatu tata nilai budaya tidak akan pernah dapat dengan lengkap dan sempurna menggambarkan tata nilai budaya Yogyakarta. Rumusan Tata Nilai Budaya Yogyakarta ini perlu dipandang sebagai upaya perumusan yang secara periodik harus senantiasa ditinjau ulang dan disempurnakan secara terus-menerus agar dapat dijadikan kiblat (orientasi), acuan (referensi), ilham (insipirasi), dan sumber pedoman bagi perilaku budaya dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan budaya masyarakat Yogyakarta selaras dengan tuntutan zaman dan dalam semangat *hamemayu hayuning bawana*.

Dalam penjelasan Perda tersebut ditegaskan, bahwa secara mendasar, suatu tata nilai menyangkut hal-hal yang sakral dan yang profan (ranah religio-spiritual), kebenaran dan ketidakbenaran (ranah logika dan ilmu pengetahuan), kebaikan dan keburukan atau kejahatan (ranah etika), keindahan dan ketidakindahan (ranah estetika), dan kepatutan atau kesopanan dan ketidakpatutan atau ketidaksopanan (ranah etiket). Dalam Tata Nilai Budaya Yogyakarta, nilai-nilai dasar tersebut terurai dalam nilai-nilai yang terkandung dalam berbagai aspek kehidupan, yakni (1) nilai religio-spiritual, (2) nilai moral, (3) nilai kemasyarakatan, (4) nilai adat dan tradisi, (5) nilai pendidikan dan pengetahuan, (6) nilai teknologi, (7) nilai penataan ruang dan arsitektur, (8) nilai mata pencaharian, (9) nilai kesenian, (10) nilai bahasa, (11) nilai benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya, (12) nilai kepemimpinan dan pemerintahan, (13) nilai kejuangan dan kebangsaan, dan (14) nilai semangat khas keyogyakartaan.

Dari keempat belas nilai yang tercantum dalam Naskah Tata Nilai Budaya Yogyakarta tersebut, tidak akan diuraikan satu persatu, tetapi dipilih beberapa nilai yang dianggap relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Jika Naskah Tata Nilai Budaya Yogyakarta mencantumkan "Tata Nilai dan Semangat Keyogyakartaan" diuraikan sebagai nilai terakhir, maka dalam uraian ini akan disampaikan terlebih dahulu.

Tata Nilai dan Semangat Keyogyakartaan merupakan nilai khas sebagai penciri khusus seluruh

elemen masyarakat Yogyakarta dan dijadikan semangat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur (*adiluhung*) dalam meraih cita-cita mulia, yang mencakup menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kelestarian dunia (*hamemayu hayuning bawana*). Dalam mengaktualisasikan nilai ini, masyarakat Yogyakarta berusaha keras bersatu-padu dan bahu-membahu mengerahkan segenap sumber daya untuk didayagunakan meraih cita-cita dan hasil yang didambakan. Hal ini dilakukan dengan semangat yang menggugah dan membangkitkan kegigihan dan kerja keras yang dinamis (*greget*), percaya diri dalam bertindak (*sungguh*), tidak akan mundur setapak pun dan siap menanggung segala risiko apa pun yang harus dihadapi (*ora mingkuh*) dengan penuh rasa tanggung jawab⁸ demi terwujudnya cita-cita yang diidam-idamkannya.

Masyarakat Yogyakarta menyadari sepenuhnya, bahwa dunia yang tergelar dengan seluruh isinya termasuk manusia ini berasal dari Tuhan dan kelak akan kembali kepada Tuhan.⁹ Tuhan diyakini sebagai asal-muasal dan tempat kembali segala sesuatu,¹⁰ yang dengan kekuasaan-Nya yang tanpa batas, menciptakan dunia beserta isinya (*jagad gedhé; makrokosmos*), termasuk manusia (*jagad cilik; mikrokosmos*),¹¹ dengan keagungan cinta kasih-Nya. Tuhan adalah penguasa di atas segala penguasa yang pernah ada di dunia. Tuhan tidak dapat digambarkan dengan perumpamaan apa pun (*tan kena kinaya apa*). Ciptaan Tuhan beraneka ragam wujud dan derajatnya, berubah-ubah, dan bersifat sementara,¹² bahkan manusia hidup di dunia ini hanyalah bersifat sementara seakan-akan sekadar singgah sejenak untuk meneguk air,¹³ sedangkan Tuhan merupakan Kenyataan Sejati (*Kasunyatan Jati*) yang bersifat Azali dan Abadi, tiada berawal pun pula tiada berakhir (Lampiran Perda No 4/2011: 10).

Dalam pandangan masyarakat Jawa, Tuhan adalah penentu segalanya, manusia harus sadar

⁸ *Lamun kapéngkoking pancabaya ubayané datan mbalénjani*

⁹ *Mulih mula mulanira*

¹⁰ *Sangkan paraning dumadi*

¹¹ Manusia sebagai mikrokosmos yang dibekali kesadaran akan cipta, rasa, dan karsa, wajib menjaga harmoni alam semesta ini dengan tanpa pamrih pribadi yang sempit atau hawa nafsu egoisme, melainkan harus dengan rela hati lahir batin (*lila legawa lair trusing batin*) bersungguh-sungguh berusaha keras secara terus-menerus (*sepi ing pamrih ramé ing gawé*) mengusahakan dan menjaga kebenaran (*bener*), kebaikan (*becik*), keindahan (*hayu*), keselamatan dan kelestarian (*rahayu*) dunia (*hamemayu hayuning bawana*).

¹² *Owah gingsiring kanyatan, mobah mosiking kahanan*

¹³ *Urip iku bebasan mung mampir ngombé*

bahwa seluruh daya upaya yang dikerahkannya memiliki keterbatasan, Tuhanlah yang akan menentukan kehidupan tiap-tiap orang. Setiap orang harus ikhlas (*lila legawa*) dan dengan sabar menerima (*sabar narima*) peran dan nasib perjalanan hidupnya. Meskipun manusia itu sekadar menjalani hidup ini¹⁴ sebagaimana digariskan oleh Tuhan, namun itu tidak berarti, bahwa orang Jawa menganut pandangan hidup fatalistik. Pandangan tersebut menunjukkan kerendahhatian orang Jawa, yaitu agar manusia tidak sombong senantiasa merasa bisa melakukan apa saja, harus tahu diri akan keterbatasan kemampuannya, jangan mendikte kehendak Tuhan, dan pandai-pandailah bersyukur.¹⁵

Nilai budaya Jawa yang menunjukkan bahwa orang Jawa tidak fatalistik¹⁶ adalah adanya anjuran untuk tetap berusaha meningkatkan taraf, harkat dan martabat kehidupannya dengan meningkatkan kekuasaan, kekayaan, dan kepandaian atau ilmu yang dimilikinya. Tujuannya adalah agar kehidupannya menjadi lebih benar, lebih baik, lebih indah, dan lebih bijaksana, bahkan sedapat mungkin menjadi orang yang sejahtera, berbahagia, dan berpengaruh secara luas karena memiliki kedudukan yang penting dalam masyarakat. Meskipun mencari harta dan kedudukan lahiriah memang dianjurkan, namun dimensi batiniah tetap lebih diutamakan.

Orang Jawa mempunyai kewajiban untuk menjaga kebaikan, keindahan, dan kelestarian dunia. Kewajiban itu harus dimulai dari diri sendiri dengan menjaga kebenaran pemikiran dan ucapan, kebaikan perilaku, keharmonisan dan keindahan tatanan pergaulan hidup, baik dengan sesama manusia, dengan alam semesta, maupun dengan Tuhan. Pada bagian lain, Lampiran Perda menjelaskan:

Kebenaran pemikiran dan ucapan membuahkan kejujuran, dan kejujuran membuahkan kebaikan. Terdapat kepastian yang tak terelakkan bahwa barang siapa berbuat baik dengan benar, niscaya dia akan tegak dan barang siapa berbuat salah dengan cara apa pun, pasti dia akan runtuh (*wong bener jejer, wong salah sèlèh*), tidak peduli apakah dia seseorang yang berdarah biru (*trahing kusuma rembesing madu, wijining atapa, tedhaking andana warih*) atau berharta dan berkedudukan sosial tinggi (*bèr bandha bèr bandhu, kajèn kèringan*), ataukah orang kecil (*wong cilik*) dengan status sosial rendah (*wong*

¹⁴ *Manungsa saderma nglakoni, kaya wayang upamané*

¹⁵ *Rumangsa bisa, bisa rumangsa, aja nggégé mangsa dan narima ing pandum*

¹⁶ Dalam ungkapan aslinya bahwa manusia harus meningkatkan harkat dan martabatnya, namun tetap mengutamakan spiritualitas, *mbudidaya; wirya, arta, winasis; mukti wibawa mbaudhendha; dan sugih tanpa bandha*

pidak pejarakan). Sesungguhnya, harkat dan martabat seseorang lebih ditentukan oleh kata dan perbuatannya (*ajining dhiri saka lathi lan pakarti*).

Sikap toleransi orang Jawa ditunjukkan dengan ajaran *ngundhuh wohing pakarti*, yaitu bahwa manusia harus berhati-hati dalam bertindak, jangan sampai melukai dan atau merugikan pihak lain, karena setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan berbuah akibat yang diterima oleh pelakunya. Dengan demikian, watak mulia harus diikhtiarkan dengan menjauhi perangai buruk seperti angkuh, bengis, jahil, serakah, panjang tangan, gila pujian,¹⁷ jangan menyombongkan kepandaian, harta, paras elok, dan busana,¹⁸ jangan pula menyombongkan diri dengan keberanian, suka menantang untuk bertengkar, tidak tahu malu, iri hati, dengki, dan suka mencela orang lain,¹⁹ dalam hidup hendaklah orang jangan menyombongkan diri dengan berlebih-lebihan membanggakan kekuatan baik fisik, harta, maupun kekuasaannya, keagungan keturunan atau kebesaran derajat sosialnya, dan kepandaiannya.²⁰

Semua watak buruk itu harus dihindari, dijauhi, dan ditinggalkan. Orang harus senantiasa berusaha menanam kebajikan dan terus-menerus menyemai budi luhur sebagai keutamaan.²¹ Orang yang baik selalu berusaha menyenangkan hati orang lain, seperti mengemukakan pendirian secara lembut, berhati-hati dalam berbicara, tingkah dan tutur katanya bersahaja setiap ucapannya terasa sejuk menembus kalbu karena dilandasi nurani yang bersih, bertenggang rasa dan berbelas kasih kepada semua makhluk hidup.²²

Semua nilai moral pribadi itu merupakan modal dalam kehidupan *bebrayan agung*, atau kehidupan bermasyarakat yang dipahami sebagai suatu keluarga yang besar, yang dilandasi oleh sikap kasih sayang, yaitu *sih kinasihan*, *asih ing sesami* di antara para anggotanya untuk mewujudkan dan menjaga kerukunan. Bagi masyarakat Jawa kerukunan merupakan tiang utama kehidupan kemasyarakatan, karena kerukunan memberikan kekuatan, sedangkan pertikaian mendatangkan kehancuran.²³ Di samping

itu, dalam hidup bersama dianjurkan untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman agar semakin cerdas mengelola kehidupan, saling mengasihi agar semakin nyaman menikmati kehidupan, dan saling membimbing agar semakin matang menjalani kehidupan. Itulah hidup bersama yang disemangati dan dihiasi oleh kemanusiaan. Artinya, keselamatan dan kesejahteraan manusia itu dapat terwujud jika nilai kemanusiaan senantiasa terjaga.²⁴ Untuk menjaga kohesi dan harmoni kehidupan sosial, hubungan antar anggota masyarakat dilandasi oleh prinsip hormat.²⁵

Satu hal yang dinilai sangat penting dalam interaksi sosial dalam kehidupan bersama dalam masyarakat adalah adanya solidaritas atau kesetiakawanan sosial antar anggota masyarakat, baik dalam keadaan senang maupun susah (*sabaya mati*, *sabaya mukti*). Prinsip ini mengharuskan setiap anggota masyarakat untuk saling tolong-menolong, bantu-membantu. Demikian pula dalam menangani urusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, antar anggota masyarakat hendaknya seia sekata, bekerja sama, bergotong-royong bahu-membahu, serta tidak menghitung-hitung imbalan bagi pekerjaan yang dilakukannya.²⁶

Nilai lain dalam budaya Jawa yang relevan bagi pemberdayaan masyarakat adalah kewajiban untuk mencari pengetahuan. Prinsip *ngèlmu iku kelakoné kanthi laku*, menunjukkan bahwa pencarian pengetahuan harus dijalani dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang memadai. Usaha keras itu harus dilandasi dengan kemauan keras, kesungguhan hati, tekad, dan semangat, karena keempat hal itu akan memberikan kekuatan, ketabahan, dan kegigihan. Di samping itu, keteguhan hati untuk tetap tegar menghadapi godaan hawa nafsu yang dapat menyesatkan merupakan faktor penting untuk memperoleh keberhasilan.²⁷ Dengan demikian, pengetahuan yang dicari akan diperoleh dengan saksama dan berguna bagi kehidupan

¹⁷ *aja ladak lan jail, aja serakah, aja celimut, aja mburu aleman.*

¹⁸ *aja sira ngegungaken akal, bagus iku dudu mas picis, lawan dudu sandhangan.*

¹⁹ *aja watak sira sugih wani, aja sok ngajak tukaran, aja anguthuh, aja ewanan lan aja jail, poma sira aja drengki, dahwen marang ing sasama)*

²⁰ *aja adigang, adigung, adiguna*

²¹ *nandur kabecikan, ndhedher kautaman.*

²² *amemangun karyénak tyasing sesama: pambegané alus; landhep tanpa natonni; tingkah una-uniné prasaja; yèn angucap ngarah-arrah; saujaré manis trus ati; kèh tepané mring sagunging urip.*

²³ *Rukun agawé santosa, crah agawé bubrah (ana rembug ya dirembug).* Prinsip ini menyiratkan, bahwa setiap persoalan

di antara anggota masyarakat, harus diselesaikan sebaik-baiknya dengan bermusyawarah secara kekeluargaan, karena masyarakat itu sejatinya merupakan suatu keluarga besar.

²⁴ *Rahayuning manungsa dumadi karana kamanungsané*

²⁵ Penghormatan ini pertama-tama diberikan kepada kedua orang tua (*ing kang dingin rama ibu*), mertua lelaki dan perempuan (*kaping kalih maratuwa lanang wadon*), saudara tua (*kaping katri marang sadulur tuwa*), guru (*kaping paté mring guru sayekti*), kepada pemimpin atau atasan (*kaping lima marang gustinira*). Secara umum, yang muda harus menghormati yang tua atau yang dituakan. Sebaliknya, yang tua atau yang dituakan wajib menghargai, melindungi, membimbing, dan menyayangi yang muda.

²⁶ *Sepi ing pamrih, ramé ing gawé*

²⁷ *Setya budy a pangekesé dur angkara*

baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat, baik untuk kehidupan duniawi maupun kehidupan ukhrowi.²⁸

Seperti telah disampaikan sebelumnya, meskipun hidup di dunia hanya sementara, tetapi tugas mulia yang harus ditunaikan manusia ialah bersungguh-sungguh berusaha keras secara terus-menerus mengusahakan dan menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan, keselamatan, dan kelestarian dunia. Wujud nyata tugas mulia itu dilakukan manusia dengan bekerja, tidak berpangku tangan tanpa bekerja, dengan mengharap rejeki yang datang tanpa berusaha. Setiap orang harus berusaha keras mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berguna baik bagi dirinya sendiri, keluarganya, masyarakat sekitarnya, negaranya, maupun bagi umat manusia seluruhnya.

Bagi masyarakat Jawa, bekerja harus dilandasi oleh kesungguhan lahir batin menghadapi segala tantangan, kesulitan, dan risiko yang mungkin timbul, jika tidak maka tidak akan mendapat hasil yang layak. Dengan demikian, dalam menghadapi setiap tantangan, kesulitan, dan risiko pekerjaan apa pun, orang harus senantiasa teguh pendirian, handal dan ulet dalam menghadapi masalah, cakap dan tangkas dalam menyelesaikan persoalan. Dalam bekerja harus teliti, cermat, dan penuh perhitungan, agar mendapat hasil yang maksimal, sehingga harus dirancang dan ditata dengan tertib, diorganisasikan dan dikelola dengan teratur, dilaksanakan dengan cermat dan saksama, ditempuh dengan langkah-langkah yang benar dan tepat, dan semua pekerjaan harus diselesaikan dengan tuntas.

Dalam melakukan pekerjaan, setiap orang menginginkan penghasilan yang layak bagi keberlangsungan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Namun, mencari keuntungan tidak boleh berujung keserakahan dan merugikan orang lain. Setiap transaksi harus dilakukan dengan jujur dan adil. Mencari

keuntungan berarti bukan hanya menguntungkan diri sendiri, melainkan juga menguntungkan orang lain sekaligus, alias saling menguntungkan. Mencari kemakmuran dan kesejahteraan berarti saling memakmurkan dan mensejahterakan satu sama lain.

Penutup

Kebudayaan Jawa berkembang melalui tradisi dari interaksi sosial masyarakat atau melalui pendidikan informal dan sejenisnya dan selalu mendapatkan tambahan dari pengalaman. Kebudayaan Jawa ini merupakan akumulasi pengalaman kolektif dari generasi ke generasi yang dinamis dan yang dapat ditafsirkan dan diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Artinya, kebudayaan Jawa merupakan konsep yang sangat luas yang merujuk pada pengetahuan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang hidup di wilayah tertentu untuk jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Perkembangan terakhir menunjukkan, bahwa kebudayaan Jawa lebih merujuk sifat tempat, di mana pengetahuan tersebut berkembang.

Budaya Jawa sebagai sumber revolusi mental memerlukan adanya upaya penguatan kelembagaan, prasarana dan akses kepada informasi dan perlu dikembangkan secara optimal dan menjadi urutan atas dalam skala prioritas. Sikap hidup gotong-royong dan kerja sama untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut kepentingan bersama, merupakan bentuk Budaya Jawa yang perlu diimplementasikan dalam revolusi mental. Dalam revolusi mental, rumusan Tata Nilai Budaya Yogyakarta ini dapat digunakan sebagai acuan, namun tetap dipandang sebagai upaya perumusan yang secara periodik senantiasa ditinjau ulang dan disempurnakan secara terus-menerus agar dapat dijadikan kiblat (orientasi), acuan (referensi), ilham (inspirasi), dan sumber pedoman bagi perilaku budaya dan peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan budaya masyarakat Indonesia selaras dengan tuntutan zaman dan dalam semangat *hamemayu hayuning bawana*.

Revolusi mental ini merupakan nilai khas sebagai penciri khusus seluruh elemen masyarakat dan dijadikan semangat dalam mengaktualisasikan nilai-nilai luhur (*adiluhung*) dalam meraih cita-cita mulia, yang mencakup menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan, dan kelestarian dunia. Dalam mengaktualisasikan nilai ini, masyarakat perlu berusaha keras bersatu-padu dan bahu-membahu mengerahkan segenap sumber daya untuk didayagunakan meraih cita-cita dan hasil yang didambakan. Hal ini dilakukan dengan semangat yang menggugah dan membangkitkan kegigihan

²⁸ Pencarian pengetahuan dilakukan melalui pendidikan sebagai proses pembudayaan manusia yang bertujuan untuk menumbuhkan, mengelola, dan meningkatkan kualitas kecerdasan kehidupannya, baik kecerdasan kejiwaan yang meliputi religio-spiritualitas, moralitas, emosionalitas, dan intelektualitasnya, maupun kesehatan dan pengembangan raganya. Penyelenggaraan pendidikan harus membuka peluang seluas-luasnya bagi aktualisasi diri dan pengembangan atas segenap potensi yang dimiliki peserta didik. Pengetahuan merupakan daur proses dan hasil pengenalan secara akumulatif dan terus-menerus yang dilakukan manusia terhadap diri sendiri dan apa saja di luar dirinya. Pengetahuan merupakan sarana yang penting bagi manusia dalam rangka menunaikan tugas mulianya, yakni mengusahakan dan menjaga kebenaran, kebaikan, keindahan, keselamatan, dan kelestarian dunia (*hamemayu hayuning bawana*)

dan kerja keras yang dinamis (*greget*), percaya diri dalam bertindak (*sungguh*), tidak akan mundur setapak pun dan siap menanggung segala risiko apa pun yang harus dihadapi (*ora mingkuh*) dengan penuh rasa tanggung jawab demi terwujudnya cita-cita yang diidam-idamkannya.

Setidaknya nilai-nilai Budaya Jawa yang dapat menjadi acuan revolusi mental adalah (1) kemandirian dalam kehidupan, bahwa kita harus (a) kerja keras, (b) percaya diri, (c) tangguh, (d) pantang menyerah, (e) ketidaktergantungan, (f) kemauan keras, (g) motivasi, (h) inovatif, (i) sabar dan cermat, dan (j) bersyukur; (2) nilai kedisiplinan, bahwa dalam kehidupan kita harus : (a) jujur, (b) taat pada aturan, (c) tepat waktu, (d) konsisten, (e) konsekuen, (f) mawas diri, dan (g) bertanggung jawab; (3) kepedulian, bahwa dalam kehidupan kita harus (a) kasih sayang kepada sesama, (b) suka menolong/membantu, (c) menghormati/menghargai sesama, (d) tidak diskriminatif/kesetaraan, (e) solidaritas sosial (f) harmoni/keseimbangan, (g) pro aktif dalam kebaikan, (h) teposeliro, (i) handarbeni, dan (j) tanggap; dan (4) nilai kebersamaan, yaitu bahwa dalam kehidupan kita harus (a) gotong royong, (b) setiakawan, (c) ikhlas, (d) rukun, dan (e) mengutamakan kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Jensen, M C. and W H. Meckling. 1976. Theory of the firm managerial behavior, agency cost and capital structure. *Journal of Finance and Economics* 3: 305 – 360.
- Moncrieffe, J. 2006. The Power of Stigma: Encounters with ‘Street Children’ and ‘Restavecs’ in Haiti. *IDS Bulletin* 37(6): 31-46.
- Nas, Peter J. M. 1998. Global, Nasional, and Lokal Perpektives Itroudction. Dalam *Globalization, Localization In Indonesia. Bijdragen Tot de Taal Land en Volkenkunda*. No.154.2. KITLV.
- Navarro, Z. 2006 In Search of Cultural Intepretation of Power. *IDS Bulletin* 37(6): 11-22.

Buku

- Alfian, Nazaruddin Syamsuddin (Ed), 1991. *Profil Budaya Politik Indonesia*. PT Temprint; Jakarta.
- Anderson, Benedict Richard O’Gorman. 1996. *Mythology and the tolerance of the Javanese Cornell Modern Indonesia Project*, Southeast Asia Program, Cornell University.
- Bourdieu, P. 1980. *The Logic of Practice*. Stanford: Stanford University Press.

- Bourdieu, P. 1984. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. London: Routledge
- Bourdieu, P. 1986. ‘The Forms of Capital’. *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Capital*. J. G. Richardson. New York: Greenwood Press: 241-58.
- Burns, Tome R dkk. 1987. *Manusia, Keputusan, Masyarakat. Teori Dinamika antara Aktor dan Sistem untuk Ilmuwan Sosial*. Penerjemah Soewono Hadisoemarto Jakarta: Pradnya Paramita.
- Burrel, G. dan G. Morgan. 1993. *Sociological Paradigms and Organizational Analysis*. New York: Ashgate Publishing Company.
- Coulon, Alain. 2008. *Etnometodologi*. Jakarta: Penerbit Lenge bersama Kelompok Kajian Studi Kultural. Diterjemahkan dari *L’ethnometodologie*. Paris: Presses Universitaires de France.
- Cox. 2004. *Poverty Alleviation Programs in the Asia-Pacific Region*. Seminar, 3rd March, Jakarta.
- Danim, Sudarman. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Featherstone, Mike. 2001. *Posmodernisme dan Budaya Konsumen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gauthama, M. P. (Ed.). 2003. *Budaya Jawa dan Masyarakat Modern*. Jakarta: P2KTPW BPPT.
- Gaventa, J. 2003. *Power after Lukes: a Review of the Literature*, Brighton: Institute of Development Studies.
- Geertz, Clifford. 1989. *Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Geertz, Hildred. 1983. *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Press
- Jong. 1976. *Salah Satu Sikap Hidup Jawa Orang Jawa dalam Endraswara, Suwardi*. 2006. *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta: Cakrawala
- Kanungo, Mendonca, 1996, *Ethical Dimensions of Leadership*, SSBE, London, New Delhi: Sage Publication, Thousand Oaks,
- Katoppo, Aristides (ed). 1979. *Satu Abad Kartini (1879-1979)*. Jakarta: Sinar Harapan, 1979
- Korten, David, C. 2002, *Menuju Abad Ke-21, Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Magnis-Suseno, Franz. 1996. *Etika Jawa: Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijakan Hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Marbangun, Hardjowirogo. 1995. *Manusia Jawa*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Ke-13. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Murniatmo, G., Sumintarsih, Sukari, Ariani, C., Nurwanti, Y. H. 2000). *Aktualisasi Nilai Budaya Bangsa di Kalangan Generasi Muda di Yogyakarta*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional. Jakarta: Depdikbud.
- Najid, Muhammad dkk (Ed), 1996. *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara*. LKPSM; Yogyakarta.
- Neuman, L.W. 1997. *Social Reseach Methodes: Qualitative & Quantitative Approach*. Boston: Allyn Bacon.
- Poloma, M. Margaret. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada. Diterjemahkan dari *Contemporary Sociological Theory*. Third Edition
- Raho, Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Penerbit Prestasi Pustaka Publisher.
- Richard I. Mann (Ed). 1996. *The Culture of Business in Indonesia*. California: Gateway Books the University of California.
- Ritzer, G, D.J. Goodman. 2003. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Penerbit Prenada Media. Diterjemahkan dari *Moder Sociological Theory*. Sixth Edition.
- Soemardjan, S. 1962. *Social Changes in Jogjakarta*. New York: Cornell University Press.
- Supadjar, Damardjati. 1989. *Keserasian Agama dan Budaya yang Tercermin pada Beberapa Kepustakaan Jawa, dalam Moralitas Pembangunan Perspektif Agama-agama di Indonesia*. Yogyakarta: Tiara wacana.

Internet

- Gunawan. 2007. “Dominasi Kebudayaan Jawa dalam Penerapan Politik Indonesia”, <https://grelove.jogja.wordpress.com/2007/07/24/dominasi-kebudayaan-jawa-dalam-penerapan-politik-indonesia>, diakses 12 September 2017.